

PROSPEK MASA DEPAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

Budisantoso S.

Para pendiri Negara Kesatuan RI yang mewakili berbagai aliran telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang kemudian dijabarkan dalam UUD 1945 yang singkat dan soepel. Sejak Orde Baru landasan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dikembalikan secara murni dan konsekuen kepada Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara, serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Agar penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, diperlukan doktrin dasar nasional yang dapat menyatukan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Doktrin dasar nasional tersebut adalah Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh Lemhannas. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional berfungsi menjembatani Pancasila dan UUD 1945 dengan kebijaksanaan (policy) dan strategi, serta peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Memasuki era Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II), bangsa Indonesia bertekad untuk menjadi bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir dan batin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Era PJP II diwarnai oleh perkembangan kehidupan nasional baik yang positif maupun negatif, serta pengaruh globalisasi yang sangat intensif, menuntut validasi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, yang pada muaranya akan menentukan prospek masa depan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Peran dan Pengabdian Lemhannas

Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 telah mengantarkan bangsa Indonesia ke alam kemerdekaan dengan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Bangsa Indonesia di dalam penyelenggaraan kehidupannya, dijiwai oleh keseluruhan cita-cita dan tujuan nasionalnya yang dirumus-

Budisantoso S., S.E., Mayjen TNI (Purn), Widya-
istwara Utama, Lembaga Ketahanan Nasional

kan dalam Pembukaan UUD 1945.

Tingkat kemajuan suatu bangsa dalam perjuangan mengejar cita-cita dan tujuan nasionalnya pada kurun waktu tertentu, pada hakikatnya merupakan hasil perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang dicapai secara bertahap, berlanjut, dan berkesinambungan, dengan pola dan cara yang sesuai dengan situasi kondisi saat itu. Meskipun pola dan cara perjuangan perlu disesuaikan dengan perubahan zaman, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun arah perjuangan hendaknya tidak bergeser dari landasan filosofi, cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) pada tanggal 20 Mei 1965 berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor : 37 Tahun 1964 tanggal 28 November 1964 dan Nomor 4 Tahun 1965 tidak lepas dari pengaruh lingkungan strategis nasional, regional dan internasional pada waktu itu, yang menuntut adanya integrasi dan kerjasama yang mantap antara sipil dan militer, serta kekuatan sosial politik dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, termasuk penyelenggaraan pertahanan keamanan.

Pada waktu itu Lemhannas merupakan badan yang langsung di bawah Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Lembaga ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam ruang lingkup kebijaksanaan (*policy*) dan strategi dalam meng-

hadapi berbagai masalah, dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 agar dapat mencapai tujuan nasional. Lemhannas juga merupakan sebuah badan konsultasi bagi lembaga-lembaga kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan tentang Ketahanan Nasional, yang dahulu diberi istilah Pertahanan Nasional.

Tujuan Lemhannas adalah untuk mencapai dan merealisasikan integrasi dan kerjasama terpadu dalam pembinaan segenap unsur potensi dan kekuatan nasional dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional. Untuk merealisasikan tujuan itu, diselenggarakan berbagai kursus, terutama Kursus Reguler (*Reguler Course*) dan Kursus Singkat (*Associate Course*) Lemhannas, yang mengkaji berbagai masalah berupa konsepsi, doktrin, kebijaksanaan dan strategi dengan ruang lingkup nasional, bidang, sektor dan wilayah dengan memperhatikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis.

Hasil kajian yang merupakan *trade mark* Lemhannas adalah Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, yang langsung secara mendasar berupaya menjawab tujuan Lemhannas. Karena dengan Wawasan Nusantara mawas ke dalam diharapkan dapat dicapai dan diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional seluruh aspek kehidupan nasional, sedangkan mawas ke luar diharapkan dapat menjamin kepentingan nasional Indonesia dalam dunia yang sarwa berubah. berlandaskan Wawasan Nusantara, Ke-

tahanan Nasional adalah kondisi dinamis kehidupan nasional yang harus diwujudkan untuk menjamin eksistensi integritas dan identitas bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Lemhannas sebagai lembaga pengkajian telah menghasilkan berbagai hasil kajian yang merupakan penjabaran dan implementasi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, antara lain adalah Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) dan Sistem Informasi Manajemen Nasional (Simnas), Ekonomi Pancasila, Sistem Politik Demokrasi Pancasila. Lemhannas juga telah merintis pengembangan Ketahanan Regional untuk Asean/Kawasan Asia Tenggara. Sebagai lembaga pendidikan, melalui Kursus Reguler dan Kursus Singkat, Lemhannas telah mendidik lebih dari 1.200 kader pimpinan nasional yang berasal dari kalangan militer dan sipil, bukan hanya dari lingkungan pemerintahan tetapi juga dari Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, serta dunia usaha. Alumni Lemhannas diharapkan memiliki kemampuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang mengacu pada Pancasila, UUD 1945 Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dalam menentukan dan merumuskan kebijaksanaan, strategi dan upaya nasional, baik secara perorangan maupun bersama-sama dalam keterpaduan yang harmonis.

Dengan demikian kehadiran Lemhannas merupakan salah satu upaya

nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara terpadu, serta menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah-tengah perkembangan dunia. Lemhannas bertugas membantu Pimpinan Nasional dalam menyelenggarakan pengkajian untuk memecahkan permasalahan nasional secara menyeluruh, terpadu, seimbang, serasi dan selaras dengan tuntutan bangsa, serta menyelenggarakan pendidikan untuk memantapkan pengembangan kader kepemimpinan nasional yang integratif.

Sejak kehadirannya pada tahun 1965 sampai tahun 1993 kedudukan dan struktur organisasi Lemhannas menegalami beberapa kali perubahan, namun fungsi utama Lemhannas, yaitu pengkajian dan pendidikan tingkat nasional tetap tidak berubah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 04/1994, nama, kedudukan, fungsi utama Lemhannas mengalami perubahan. Nama yang semula Lembaga Pertahanan Nasional diubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat Lemhannas (tetap). Nama Lembaga Ketahanan Nasional dirasakan lebih tepat dan sesuai dengan tujuan, tugas dan fungsi utama Lemhannas dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional.

Kedudukan Lemhannas yang semula di bawah Panglima ABRI digeser menjadi di bawah Menteri Pertahanan Keamanan. Sedangkan fungsi utama Lemhannas, selain pengkajian dan pendidikan tingkat nasional, di-

tambah fungsi pemasyarakatan Doktrin Dasar Nasional yaitu Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Sebenarnya fungsi pemasyarakatan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional ini sudah dilaksanakan sebelumnya, antara lain melalui Forum Komunikasi Kordinasi Operasi Penerangan (Fokkopen) yang merupakan kerjasama Departemen Penerangan dengan Lemhannas, dan melalui pengkajian, pendidikan dan penataran yang merupakan kerjasama Lemhannas dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi (PTN dan PTS). Lemhannas bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Pendidikan Kewiraan yang merupakan matakuliah wajib untuk mahasiswa S-1 di semua PTN dan PTS, dan Program S-2 Studi Pengkajian Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia (UI) dari Universitas Gajah Mada (UGM), dengan tujuan menghasilkan Magister Ketahanan Nasional (S-2) dan membakukan Ilmu Ketahanan Nasional. Dalam rangka Kewaspadaan Nasional, Lemhannas bekerjasama dengan Kopkamtib (sekarang Bakorstannas) menyelenggarakan kajian dan kursus/penerangan Kewaspadaan Nasional.

Tantangan Masa Depan

Dalam era PJP II, masyarakat Indonesia akan mengalami banyak perubahan, baik dari dalam negeri akibat keberhasilan dan sukses pembangunan, maupun sebagai dampak perubahan

lingkungan strategis global dan regional. Pembangunan ekonomi yang merupakan titik berat pembangunan nasional telah dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, struktur perekonomian yang makin berimbang antara sektor pertanian dan industri, terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, serta mampu memberikan dukungan terhadap pembangunan bidang-bidang lainnya. Namun masih banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi, terutama terjadinya kesenjangan ekonomi antar-golongan dan antardaerah, serta kecenderungan warga masyarakat yang mengutamakan mengejar kepuasan materi (kebendaan), dengan mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber pada Pancasila. Keberhasilan pembangunan politik telah makin memantapkan tatanan (sistem) kehidupan politik nasional berdasarkan Demokrasi Pancasila. Sejalan dengan makin meningkatnya kecerdasan masyarakat dan makin meningkatnya kesejahteraan menimbulkan tuntutan peningkatan kualitas Demokrasi Pancasila yang makin memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat, keterbukaan, keadilan dan keteladanan para pemimpin bangsa.

Akibat kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang transportasi, telekomunikasi dan sistem informasi, menimbulkan globalisasi yang melanda dunia, mengakibatkan kegiatan pembangunan nasional makin terkait dengan perkem-

angunan internasional dan regional, khususnya dalam perdagangan barang dan jasa, serta investasi. Dalam era globalisasi, hubungan antarbangsa menempatkan ekonomi dan perdagangan sebagai "penjuru" dan menjadi perimbangan kekuatan strategis. Dalam pertarungan ekonomi seperti itu, terbentuklah berbagai kelompok aliansi ekonomi yang didasarkan pada kawasan regional seperti ME, NAFTA, AFTA, APEC, dan lain-lain yang pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi dan perdagangan dalam persaingan yang sangat ketat.

Setelah usainya perang dingin, pihak Barat yang pada umumnya menganut paham Liberalisme/Kapitalisme, telah melancarkan usul/tuntutan demokratisasi, HAM dan kelestarian lingkungan hidup terutama kelestarian hutan tropis di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sedangkan negara-negara eks blok Timur, dan negara-negara berkembang pada umumnya yang masih harus berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dilanda berbagai keonaran dan bentrokan serta timbul perpecahan (disintegrasi) yang didasarkan pada perbedaan etnis, suku, golongan dan agama. Melalui jaringan media komunikasi masa multinasional yang pada umumnya masih dikuasai oleh negara-negara maju, ditambah adanya oknum-oknum bangsa Indonesia yang tidak/kurang memahami Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, mereka secara sadar atau tidak sadar

telah meojokkan Indonesia dan merugikan kepentingan nasional kita sebagai bangsa yang sedang berjuang mengisi kemerdekaan.

Dampak dari sukses pembangunan nasional, serta pengaruh perkembangan global dan regional akan makin menimbulkan kerawanan bila sengaja dikaitkan dengan kesenjangan sosial ekonomi antar golongan dan antar daerah, serta masalah suku, agama dan ras. Masalah ini akan akan mudah sekali meledak menjadi kerusuhan masal yang dengan cepat dapat menjalar secara luas. Di samping itu, isu hak asasi manusia, keadilan dan putera daerah akan akan menambah kerawanan terhadap integritas bangsa dan Negara Kesatuan R.I. Dalam menghadapi tantangan masa depan seperti yang telah diuraikan di atas, Lemhannas dituntut untuk lebih meningkatkan pengabdian dan perannya sesuai fungsi utamanya dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional.

Prospek Masa Depan

Dalam menelaah prospek masa depan Lemhannas, pertama-tama perlu dikaji apakah konsepsi yang merupakan *trademark* Lemhannas yaitu Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional masih relevan untuk menjawab tantangan masa depan.

Dalam situasi dan kondisi yang mengandung potensi disintegrasi, Wawasan Nusantara yang mawas kedalam menghendaki terwujudnya

persatuan dan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan di seluruh Nusantara, harus benar-benar dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nasional dan penyelenggaraan pembangunan nasional. Wawasan Nusantara mawas keluar sangat penting dipahami dan dihayati dalam menentukan sikap kita dalam hubungan antar-bangsa yang selalu diabdikan kepada kepentingan nasional. Sedangkan konsepsi Ketahanan Nasional dengan segala asas, ciri dan sifatnya, khususnya yang tidak mengutamakan adu kekuasaan atau kekuatan (*power concept*), sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang diwarnai oleh persaingan ketat, tetapi juga diwarnai oleh kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan konsepsi Ketahanan Nasional yang secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan, kita bangun seluruh aspek kehidupan yang meliputi Astagatra dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif serta memanfaatkan peluang-peluang kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan. Dengan Konsepsi Ketahanan Nasional telah dikembangkan Konsepsi Ketahanan Nasional Regional, yang telah diterima oleh negara-negara Asean, menyumbangkan kondisi perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara yang sangat diperlukan bagi kelancaran pembangunan nasional.

Dalam PJP II yang diwarnai persaingan yang ketat dan kerjasama

yang saling menguntungkan, diperlukan manusia Indonesia yang berkualitas baik dari segi fisik seperti kesehatan dan kesempataan jasmani (*physical fitness*), maupun dari segi nonfisik seperti moral dan etika, semangat dan tekad juang, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta profesionalisme yang tinggi, khususnya para pemimpin bangsa. Bapak Presiden Soeharto dalam amanatnya kepada peserta KRA XXVI Lemhannas pada tanggal 27 September 1993, antara lain menyatakan: "lapisan kepemimpinan adalah bagian yang paling aktif, kreatif dan dinamis dari suatu masyarakat. Pemimpinlah yang harus mengubah kendala menjadi peluang, mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Pemimpin pula yang harus menunjukkan arah yang jelas dan tegas pada saat orang banyak saling bertanya tentang apa yang sedang terjadi di sekitarnya".

Oleh karena itu mantapnya lapisan Kepemimpinan Nasional pada supra dan infrastruktur, serta dunia usaha, di tingkat pusat dan di daerah sangatlah penting. Agar para pemimpin bangsa dapat melaksanakan perannya, hendaknya sungguh-sungguh memahami dan menghayati cita-cita dan tujuan nasional, Pancasila dan UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Konsepsi Ketahanan Nasional. Dalam PJP II sejalan dengan makin meningkatnya kecerdasan bangsa, maka para Pemimpin pada infrastruktur, termasuk para Cendekiawan perlu makin meningkatkan peranannya

dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan kontrol sosial, serta menggerakkan partisipasi masyarakat. Para pengusaha nasional harus makin mampu memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan memegang teguh etika bisnis, menghindari kolusi, manipulasi, dan pencemaran lingkungan hidup. Sebaliknya para pemimpin pada suprastruktur harus makin peka dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan mampu mengambil keputusan yang arief sebagai hasil musyawarah untuk mufakat berdasarkan Pancasila, UUD 1945 Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula media massa harus makin mampu sebagai media komunikasi timbalbalik antara pemerintah dengan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara, serta mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Apa yang telah dikerjakan oleh Lemhannas sampai saat ini sudah pada jalur atau arah yang benar (*on the right track*), namun dalam tahun-tahun mendatang masih diperlukan peningkatan dan perluasan upaya melalui penyelenggaraan pengkajian, pendidikan dan pemasyarakatan Doktrin Dasar Nasional dan hasil kajian Lemhannas dengan didukung oleh program pengembangan kelembagaan (*institution development pro-*

gram). Berhasil tidaknya pelaksanaan tugas Lemhannas tidak boleh diukur dari kegiatan Lemhannas saja (*an sich*), tetapi harus ditinjau terutama dari dampak hasil kajiannya, serta kinerja para alumnya dalam keseluruhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara lebih rinci, pokok-pokok kegiatan Lemhannas pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Pengkajian

- 1) Peningkatan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka mendukung kegiatan pengkajian.
- 2) Penajaman kajian sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial budaya dan sistem pertahanan keamanan yang berlandaskan Pancasila, dan UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- 3) Penajaman kajian terhadap kecenderungan perkembangan internasional, regional dan nasional, serta daerah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan kendala, serta hakikat ancaman dan kewaspadaan nasional.
- 4) Penajaman kajian telaahan strategis nasional, kebijaksanaan nasional dan strategi nasional dalam rangka mencapai sasaran-sasaran bidang dan sektor pembangunan nasional.
- 5) Penajaman kajian tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan negara termasuk hubungan

fungsional antara komando ABRI, instansi pemerintah dan kepemimpinan masyarakat, baik pada masa damai maupun masa darurat.

- 6) Peningkatan keikutsertaan secara selektif para pakar, perwira ABRI dan alumni dalam kajian di Lemhannas.

b. Pendidikan

- 1) Penataan kembali kurikulum KRA dan KSA, agar lebih mencapai tujuan pendidikan yaitu kemampuan kader Kepemimpinan Nasional yang integratif yang benar-benar memahami misi bersama yang mereka emban.
- 2) Mengubah komposisi calon peserta KRA, KSA yang jumlahnya ± 100 orang per angkatan dengan menambah jumlah peserta dari calon non-ABRI, terutama dari Lembaga Pemerintahan di tingkat Pusat Pimpinan Daerah, Pimpinan dari Orsospol, Orkesmas, Wartawan, Dunia Usaha Perguruan Tinggi dan lain-lainnya ($\pm 65\%$).
- 3) Meningkatkan koordinasi dan arahan terhadap Widyaiswara dan pejabat/pakar yang menyampaikan ceramah pada kursus/penataran baik di Lemhannas maupun di luar Lemhannas, sesuai silabus yang ditetapkan.
- 4) Memanfaatkan peserta, terutama KRA dan KSP untuk turut serta dalam pengkajian

dalam kegiatan diskusi, Program Pilihan, Taskap dan seminar.

- 5) Menyelenggarakan pendidikan/kursus nonreguler yang bertingkat strategis (selektif), pemerintah dalam rangka kerjasama dengan departemen/instansi pemerintah dan swasta yang terkait.

c. Pemasarakatan Doktrin Dasar Nasional Hasil Rumusan Kajian Lemhannas Rumusan Kajian Lemhannas

- 1) Meningkatkan publikasi dan buku cetakan Doktrin Dasar Nasional dan Hasil Rumusan Kajian Lemhannas, menyebarkanluarkannya baik di tingkat pusat dan maupun di tingkat daerah, serta di lembaga-lembaga pendidikan.
- 2) Meningkatkan kerjasama Lemhannas dengan Depdikbud dan Perguruan Tinggi dalam rangka penyempurnaan PPBN dan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat Dikdasmen, dan tingkat Pendidikan Tinggi yang meliputi program Pendidikan Kewiraan di S1/Diploma, Studi Tannas di S-2 dan S-3.
- 3) Meningkatkan kerjasama kajian dengan Departemen/Instansi Pemerintah dalam rangka pengimplementasian Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam perumusan Kebijakan dan Strategi Departemen/Instansi Pemerintah.

- 4) Meningkatkan kerjasama dengan Deppen dalam rangka pemasyarakatan Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Kesadaran Bela Negara melalui media penerangan dan media massa.

- 5) Memanfaatkan peluang program Tarpadnas di daerah-daerah melalui para widyaiswara dalam meningkatkan keterpaduan upaya antara Komando ABRI Daerah, Pemda dan kepemimpinan Masyarakat di daerah.

- 6) Meningkatkan kegiatan pertemuan ilmiah baik di dalam maupun di luar Lemhannas.

d. Pembinaan Lembaga

- 1) Penyempurnaan dan pengembangan Organisasi Lemhannas dan mekanisme kerjanya sesuai tuntutan tugas.
- 2) Pengisian personil, sarana dan prasarana dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, termasuk upaya meningkatkan kepustakaan lembaga sebagai sumber referensi yang handal.
- 3) Dukungan anggaran yang cukup memadai bagi kegiatan pengkajian, pendidikan dan pemasyarakatan.
- 4) Meningkatkan pembinaan Keluarga Besar Lemhannas yang

meliputi anggota organik Lemhannas, IKAL, KKL, Alumni S-2 Tannas dan Alumni pendidikan Lemhannas lainnya.

Penutup

Di masa depan Lemhannas dituntut untuk lebih meningkatkan peran dan pengabdian dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang sangat berat dalam era globalisasi. Seluruh warga keluarga besar Lemhannas di mana pun berada dan apa pun kedudukan dan profesinya, hendaknya mampu mengemban misi menciptakan persatuan dan kesatuan nasional, kokohnya Ketahanan Nasional dan menjamin kepentingan nasional Indonesia dalam hubungan antarbangsa. Oleh karena itu Doktrin Dasar Nasional : Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, harus benar-benar dipahami, dihayati dan diamalkan, karena "last but not least" sangat diperlukan semangat, tekad dan kesungguhan dari seluruh warga keluarga besar Lemhannas untuk mengadakan saling berkonsultasi, koordinasi dan kerjasama guna menciptakan keterpaduan upaya secara efektif dan efisien dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional.

